2. LANDASAN TEORI

Untuk dapat memahami hasil temuan dalam menjawab yang dikemukakan penulis merasa perlu menuliskan landasan teori yang menjadi acuan sehingga bahasan akan menjadi semakin jelas.

Bab ini akan memuat tidak hanya definisi arti dari beberapa istilah, faktor pendorong dan penghalang serta tanggapan tokoh pariwisata.

2.1. Arti Fiskal

Fiskal luar negeri adalah pajak penghasilan (PPh) yang wajib dibayar oleh setiap orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri. Fiskal ini adalah berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang perubahan tarif Fiskal Luar Negeri yang mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 1998.

“Pembayaran fiskal luar negeri diberlakukan bagi anggota keluarga sedarah, semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. TBPFLN (Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri) diisi dengan nama atau identitas anggota keluarga yang bertolak ke luar negeri, dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang dicantumkan adalah NPWP kepala keluarga. Apabila kepala keluarga tidak mempunyai NPWP maka NPWP yang dicantumkan adalah 0.000.000.0-XXX (kode KPP dimana kepala keluarga bertempat)” ([http://www.pajak.go.id/...](http://www.pajak.go.id/)).

2.1.1. Tarif Fiskal Luar Negeri dan Ketentuannya

Tarif fiskal luar negeri dibedakan berdasarkan jenis perjalanan apakah menggunakan angkutan darat, laut, dan udara. Sedang ketentuan pembayaran dibedakan berdasarkan apakah seseorang memiliki NPWP atau tidak ([http://www.pajak.go.id/...](http://www.pajak.go.id/)).

- Tarif Fiskal Luar Negeri

Pembayaran fiskal luar negeri dilakukan dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN), sebesar:

- a. Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), untuk satu kali perjalanan dengan menggunakan pesawat udara;

- b. Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk setiap kali perjalanan dengan menggunakan kapal laut;
- c. Rp. 200.000 (dua ratus ribu ruipiah), untuk setiap kali perjalanan melalui darat.

2.1.2. Ketentuan Pembayaran Fiskal Luar Negeri

Pembayaran fiskal luar negeri bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri merupakan pembayaran PPh pasal 25 yang dapat dikreditkan dengan PPh yang terulang pada SPT tahunan PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan. Pembayaran fiskal luar negeri bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak mempunyai NPWP dapat dikreditkan dengan syarat Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP serta menyampaikan SPT tahunan PPh ke kantor pelayanan pajak tempat domisili wajib pajak. Pembayaran fiskal luar negeri bagi karyawan yang bertolak ke luar negeri tidak dapat dikreditkan dengan PPh pasal 21 oleh karena merupakan pembayaran PPh pasal 25.

2.1.3. Persyaratan Khusus Pembebasan Fiskal Luar Negeri

Pengecualian dari kewajiban membayar Fiskal Luar Negeri diatur dengan cara:

- Pembebasan langsung, diberikan oleh pejabat imigrasi yang bertugas di pelabuhan atau tempat pemberangkatan ke luar negeri, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Anggota Korps Diplomatik, Pegawai Perwakilan Negara Asing, staf dari Badan-Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tenaga ahli dalam rangka kerjasama teknik dan staf dari Badan/Organisasi Internasional yang mendapat persetujuan Pemerintah RI, yang berangkat ke luar negeri dengan menggunakan Paspor Diplomatik, sepanjang bukan Warga Negara Indonseia(WNI) dan di samping jabatan resminya, tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha di Indonesia.
Dari mereka tersebut pada butir (a), sepanjang bukan WNI dalam rangka keberangkatan untuk penempatan di luar negeri.
 - b. Pejabat Negara, anggota ABRI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertolak ke luar negeri dalam rangka dinas yang menggunakan Paspor Dinas, dan dilengkapi dengan surat tugas atau surat perjalanan dinas ke

luar negeri dari instansi/kesatuan yang bersangkutan, untuk setiap kali keberangkatan, tidak termasuk anggota rumah tangga.

- c. Pejabat Negara, anggota ABRI dan PNS termasuk istri dan anak-anaknya yang:
 - Belum berusia 25 tahun.
 - Belum kawin.
 - Tidak mempunyai mata pencaharian.
 - Tidak menjadi tanggungan dan tinggal di wilayah akreditasi.
 - Merupakan anggota rumah tangga dalam rangka penempatannya di luar negeri.
- d. Anggota ABRI yang bertugas sebagai Pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam rangka latihan bersama dengan pasukan negara lain di luar negeri.
- e. Petugas Imigrasi yang melakukan tugas pendataan keimigrasian di atas pesawat terbang perusahaan penerbangan internasional.
- f. Jemaah haji yang penyelenggarannya dilakukan oleh Departemen Agama dan petugas pelaksana pemberangkatan haji yang pembiayaannya dibebankan pada dana ONH.
- g. Para pekerja WNI yang akan bekerja di luar negeri dalam rangka pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan persetujuan/rekomendasi Departemen Tenaga Kerja yang telah disahkan oleh Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri di kota pelabuhan pemberangkatan.
- h. Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal tetap di Indonesia dengan visa turis transit, sosial budaya, kunjungan usaha, dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia serta berada di Indonesai tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- i. Orang asing yang karena sesuatu hal diperintahkan oleh Pemerintah Indonesia untuk meninggalkan wilayah Indonesia.
- j. Awak dari pesawat terbang dan kapal laut serta kendaraan umum angkutan darat yang beroperasi di jalur internasional ataua melakukan penerbangan, pelayaran dan operasai berdasarkan perjanjian charter pengangkutan.

- Pembebasan melalui pemberian Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN), dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat keberangkatan luar negeri
 - b. Bila permohonan disetujui, maka akan diberikan rekomendasi pembebasan Fiskal Luar Negeri
 - c. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Unit Fiskal Luar Negeri di pelabuhan tempat pemberangkatan akan menerbitkan SKBFLN.

Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang bekerja di Indonesia untuk kepentingan kantor perwakilan wilayah perusahaan asing, permohonan pembebasan kewajiban membayar Fiskal Luar Negeri diajukan kepada Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai inti pelaksana Fiskal Luar Negeri dimana kantor perwakilan wilayah perusahaan asing tersebut berkedudukan, sebagai pengganti SKBFLN.

2.2. Faktor pendorong dan penghalang perjalanan wisata

2.2.1. Faktor pendorong

Biaya merupakan faktor yang berpengaruh dalam memotivasi seseorang dalam melakukan perjalanan (*Mcintosh, p. 130*). Dalam referensi tersebut dikatakan bahwa Biaya serta Pendapatan merupakan faktor pertimbangan bagi seseorang dalam melakukan perjalanan. Dan menentukan seseorang dalam memutuskan apakah seseorang tersebut melakukan perjalanan dengan menggunakan Transportasi Udara atau Transport Darat, dan Transport Air.

2.2.2. Faktor penghalang seseorang dalam melakukan perjalanan.

(*Mcintosh, p.127*)

- Biaya: Seseorang yang bepergian harus melakukan penghitungan dana yang akan digunakan untuk perjalanan wisata. Sebab, dana yang ada juga masih diperlukan untuk mencukupi kebutuhan lainnya. Dengan mengatakan bahwa berwisata membutuhkan biaya yang mahal adalah cara lain untuk mengungkapkan bahwa berwisata tidaklah terlalu penting.

Dalam hal ini faktor biaya merupakan hal yang mendasar bagi seseorang lebih memilih tinggal di rumah daripada berwisata.

Sedang faktor –faktor penghalang lainnya adalah :

- Waktu senggang.
- Terbatasnya kemampuan fisik.
- Alasan Kekeluargaan.
- Kurangnya ketertarikan untuk berwisata.
- Rasa Aman.

2.2.3. Beberapa aspek orang melakukan perjalanan (*Mcintosh, p.168*)

- Aspek Fisik: Hal ini berkaitan erat tingkat fisik seseorang yaitu Faktor penghalang seseorang dalam bepergian atau melakukan perjalanan wisata akan melakukan perjalanan mereka lebih mengutamakan untuk beristirahat mengurangi tingkat aktifitas.
- Aspek Budaya: Keingintahuan seseorang terhadap budaya dari daerah tertentu baik dalam hal musik, seni dan agama.
- Aspek Personal: Seseorang bepergian untuk bertemu dengan teman ataupun mengunjungi teman , dan keluar dari aktifitas baik itu pekerjaan, keluarga yang selama ini melelahkan.
- Aspek Status: Dalam aspek ini seseorang melakukan perjalanan yang berhubungan dengan bisnis, belajar, pendidikan

2.3. **Tanggapan tokoh–tokoh pariwisata mengenai asumsi penghapusan fiskal Luar Negeri**

Bapak Yulianto Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Jawa Timur mengatakan bahwa Pariwisata di Indonesia terseok-seok sebab tidak adanya koordinasi yang cukup khususnya dalam pembenahan dan kesejahteraan pariwisata, sehingga menghambat lajunya kepariwisataan Indonesia (*Kompas,15 Desember 2004, h. F*). Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Surabaya Yusak Anshori (*Kompas,15 Desember 2004, h. F*), mengatakan penduduk kurang memiliki kesadaran untuk meningkatkan suatu daerah wisata menjadi tempat yang berpotensi meningkatkan pendapatan baik Pemerintah daerah pun sering maupun masyarakat sekitar. Pemeritah daerah pun terlihat kurang peka dalam menyikapinya. Melihat hal ini pelaku pariwisata merasa

prihatin bagaimana kepariwisataan Indonesia dapat berkembang bahkan bersaing dengan kepariwisataan manca negara bila sarana dan prasarana seperti infrastruktur, akomodasi, dan sumber daya manusia tidak dipersiapkan.

Di satu sisi ada desakan dari sebagian Industri misalnya PT. Garuda Indonesia, beberapa BPW (Biro Perjalanan Wisata) agar pemerintah meninjau kembali pajak fiskal yang harus dibayar oleh setiap warga negara Indonesia yang akan keluar dari Indonesia atau disebut “Outbound “. Hal ini didasari pemikiran bahwa penghapusan fiskal berarti menghemat biaya perjalanan, dan akan memacu geliat industri kepariwisataan Indonesia. (<http://www.kompas.com>).

Namun demikian nada pesimis juga timbul sebagai dampak isu pembebasan fiskal luar negeri yaitu rasa takut akan hilangnya wisatawan domestik untuk berwisata didalam negeri. Hal ini didukung dari beberapa referensi (*Kompas, 23 September 2004, h 40*), mengatakan bahwa pemerintah mengumumkan tentang akan dihapuskannya fiskal luar negeri dan hal ini menimbulkan berbagai reaksi yang bermacam-macam dari orang-orang yang terlibat dalam industri pariwisata, khususnya pariwisata domestik. Sebagian berpendapat Pariwisata domestik di Indonesia akan semakin terpuruk karena masyarakat akan lebih memilih untuk pergi ke luar negeri sebab harga tiket pesawat saat ini relatif murah. Selain itu, keamanan dalam negeri yang tidak terkontrol membuat wisatawan asing enggan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia khususnya berwisata.

Di samping pelaku pariwisata yang pesimis terhadap pariwisata domestik di Indonesia, ada beberapa kalangan perhotelan yang mempunyai pandangan sebaliknya. G.M Hotel Patra Bali menghimbau agar tidak perlu secara berlebihan mencemaskan keterpurukan pariwisata domestik sebagai akibat dari penghapusan kebijakan fiskal luar negeri. Hal ini dikarenakan penghapusan fiskal tersebut adalah suatu kebijakan bersama negara-negara Asia Tenggara. Beliau mengatakan industri pariwisata di Indonesia tidak akan kehilangan wisatawan domestiknya karena bangsa Indonesia memiliki keunikan budaya alam yang berbeda dengan negara-negara lainnya yang hanya mengandalkan wisata shopping seperti Singapore dan Malaysia (*Kompas, 23 September 2004. h.40*). Oleh karena itu pelaku pariwisata domestik harus tetap optimis dan melakukan pengembangan di berbagai sektor sebab keunikan tersebut malah akan semakin dibanjiri oleh wisatawan dari negara-negara tetangga.